

**IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB NEGARA
TERHADAP HAK KESEHATAN BAGI PASIEN
HIV/AIDS STUDI KASUS KABUPATEN SUKABUMI**

SKRIPSI

GUNAWAN ALFARIZI

20200090084



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS BISNIS, HUKUM DAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NUSA PUTRA
SUKABUMI
2025**

**IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB NEGARA
TERHADAP HAK KESEHATAN BAGI PASIEN
HIV/AIDS STUDI KASUS KABUPATEN SUKABUMI**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh Program Studi
Ilmu Hukum*

GUNAWAN ALFARIZI

20200090084



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS BISNIS, HUKUM DAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NUSA PUTRA
SUKABUMI
2025**

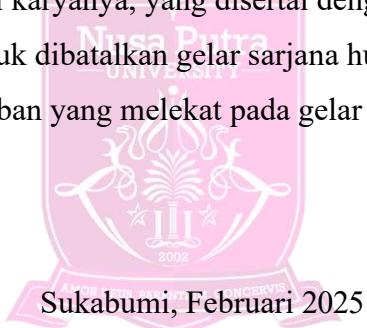
PERNYATAAN PENULIS

JUDUL : IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB NEGARA
TERHADAP HAK KESEHATAN BAGI PASIEN
HIV/AIDS STUDI KASUS KABUPATEN SUKABUMI

NAMA : GUNAWAN ALFARIZI

NIM : 20200090084

“Saya bertanggung jawab dengan sebenarnya bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar sarjana hukum saya beserta hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut”.



Gunawan alfarizi

Penulis

PENGESAHAN SKRIPSI

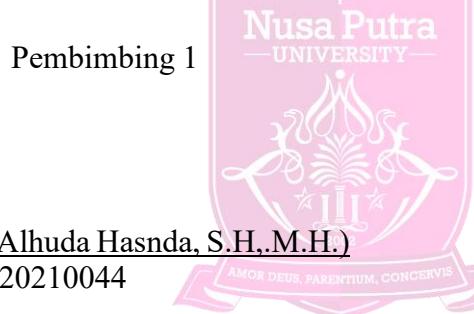
JUDUL : IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP
HAK KESEHATAN BAGI PASIEN HIV/AIDS STUDI KASUS
KABUPATEN SUKABUMI

NAMA : GUNAWAN ALFARIZI

NIM 20200090084

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan didepan dewan penguji pada sidang
skripsi pada tanggal 31 januari 2025. Menurut pandangan kami, skripsi ini
memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugrahan gelar sarjana Hukum
(S.H.).

Sukabumi, Februari 2025



Pembimbing 1

Pembimbing 2

(Nuchrada Alhuda Hasnda, S.H.,M.H.)

NIDN. 0120210044

(Armansyah, SH., M.H.)

NIDN. 0426069302

Ketua Penguji

Plt. Ketua Program Studi

(Muhammad Ridho Sinaga, S.H.,M.H)

NIDN.0429129602

(Endah Pertiwi, S.H.,M.Kn.)

NIDN.0424019501

Plh. Dekan Fakultas Hukum Dan Pendidikan

(CSA Teddy Lesmana, S.H.,M.H.)

NIDN 0414058705

Skripsi ini akhirnya tuntas dengan segala usaha dan ketulusan. Kupersembahkan sepenuh hati untuk Ayah dan Ibu tercinta sumber kekuatan dan inspirasiku. Perjalanan ini penuh perjuangan, melewati tantangan yang menguras waktu, pikiran, tenaga, bahkan finansial. Namun, setiap langkah terasa lebih ringan berkat doa dan dukungan tanpa henti dari Ayah dan Ibu. Terima kasih telah selalu membersamaiku dalam setiap keadaan, Dengan penuh rasa syukur, anakmu resmi menyandang gelar Sarjana Hukum. Gelar ini adalah milik kita bersama.

My great love is for both of you.



ABSTRACT

Human Immunodeficiency Virus is a virus that attacks the immune system which can weaken the body's ability to fight infections and diseases. People living with HIV/AIDS (PLWHA) often face various problems in obtaining their health rights, despite efforts to provide better access. The type of research used is normative-empirical research, which digs up information in the field Normative-empirical research is used to analyze or find out the extent to which regulations or laws and laws that run effectively challenges HIV/AIDS handling programs in Sukabumi often face challenges, namely budget limitations and scarcity of antiretroviral drugs (ARVs). Efforts to prevent HIV/AIDS transmission are also carried out by increasing PDP services and VCT clinics at health centers, Rehabilitation Rehabilitation in HIV/AIDS management is aimed specifically at PLWHA who experience mental problems, difficulty controlling themselves. The HIV/AIDS response in Sukabumi district still faces various challenges, mainly related to budget availability, drug scarcity, and uneven access to health services. The Sukabumi District Government has made several efforts in HIV/AIDS response. This can be seen from the various efforts that have been made, such as the preparation of Regional Regulations, budget allocations, provision of health services, and prevention programs. Based on the results of the research, the author suggests that policy makers in Sukabumi City immediately take strategic steps to accelerate the achievement of HIV/AIDS elimination targets by 2030. The author suggests that the community should increase awareness and knowledge of the dangers of HIV.

Keywords: HIV Virus, Implementation, State Responsibility, Right to Health.



ABSTRAK

HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Pengidap HIV/AIDS (ODHA) sering menghadapi berbagai masalah dalam mendapatkan hak kesehatan mereka, meskipun ada upaya untuk menyediakan akses yang lebih baik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris, yaitu menggali informasi dilapangan Penelitian normatif-empiris digunakan untuk menganalisis atau mengetahui sudah sejauh mana peraturan atau undang-undang dan hukum yang berjalan secara efektif tantangan Program penanganan HIV/AIDS di Sukabumi sering menghadapi tantangan yaitu keterbatasan anggaran dan Kelangkaan obat antiretroviral (ARV). Upaya pencegahan penularan HIV/AIDS juga dilakukan dengan meningkatkan layanan PDP dan klinik VCT pada puskesmas, Rehabilitasi Rehabilitasi pada penanggulangan HIV/AIDS ditujukan khusus untuk ODHA yang mengalami permasalahan gangguan mental, kesulitan mengendalikan dirinya. Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Sukabumi masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan ketersediaan anggaran, kelangkaan obat, dan akses layanan kesehatan yang belum merata. Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah melakukan beberapa upaya dalam penanggulangan HIV/AIDS. Hal ini terlihat dari berbagai upaya yang telah dilakukan, seperti penyusunan Peraturan Daerah, alokasi anggaran, penyediaan layanan kesehatan, dan program-program pencegahan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Penulis menyarankan agar pemangku kebijakan di Kabupaten Sukabumi segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mempercepat pencapaian target eliminasi HIV/AIDS pada tahun 2030. penulis menyarankan untuk masyarakat agar meningkatkan kesadaran dan pengetahuan akan bahaya HIV.

Kata kunci: *Virus HIV, Implementasi, Tanggung Jawab Negara, Hak Kesehatan.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh tanggung jawab disertai dengan rasa bangga terhadap diri sendiri karena telah berhasil melewatkannya. Tujuan penulisan skripsi ini adalah guna memenuhi salah satu tugas akhir.

Dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu di Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra, sehingga selanjutnya dianggap layak untuk menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H). Selain itu penulisan skripsi ini bertujuan untuk menilai kompetensi terhadap diri sendiri sebagai keberhasilan penulis dalam mendapatkan pengetahuan dan keilmuan semasa menempuh pendidikan selama empat tahun lamanya. Dan tentunya skripsi ini dapat dimanfaatkan oleh para pembaca sebagai sumber referensi berikutnya, atau bahkan kebermanfaatan lainnya.

Sehubungan dengan itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Nusa Putra Bapak Dr. Kurniawan, S.T., M.Si.,M.M. yang begitu luar biasa dalam melakukan upaya pembangunan dan perubahan pada kampus tercinta secara signifikan.
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Nusa Putra Bapak Anggy Praditha Junfithrana, S.Pd., M.T. yang telah merancang dan menerapkan sistem kurikulum pendidikan di Universitas Nusa Putra yang mampu menghasilkan lulusan-lulusan kompeten dalam bidangnya masing-masing.
3. Ketua Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra Bapak CSA Teddy Lesmana, S.H.,M.H sekaligus yang sudah bersusah payah dalam memberikan kebijakan- kebijakan bagi mahasiswa hukum di Universitas Nusa Putra sehingga dianggap mampu memberikan yang terbaik dalam segala halnya.
4. Dosen Pembimbing I Universitas Nusa Putra Bapak Nuchrada Alhuda Hasnda,S.H.,M.H. yang menjadi saksi atas perjuangan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan begitu banyaknya pengorbanan yang telah dilewati secara bersama-sama. Dan tak lupa terima kasih atas waktu dan

pemikiran Dosen Pembimbing I yang turut serta berkontribusi dalam memaksimalkan skripsi ini agar mendapatkan hasil yang sangat memuaskan.

5. Dosen Pembimbing II Universitas Nusa Putra Bapak Armansyah, S.H. M.H. yang bersama-sama turut serta berkontribusi waktu dan pemikiran dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen Penguji Skripsi bapak Muhammad Ridho Sinaga, S.H.,M.H dan Bapak CSA Teddy Lesmana S.H.,M.H yang dalam hal ini telah memberikan kritik, saran dan masukan untuk menjadikan skripsi ini sangat berkualitas.
7. Para Dosen Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra yang tanpa Lelah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis semasa menempuh pendidikan di Universitas Nusa Putra.
8. Ayahanda tercinta Bapak Abudin dan Ibunda tersayang Ibu Aminah, terimakasih untuk doa yang selalu terlangitkan setiap waktunya sehingga penulis bias menyelesaikan masa pendidikannya.
9. Rekan-rekan mahasiswa hukum Universitas Nusa Putra angkatan 2020 yang selalu bersama-sama berjuang untuk tujuan dan cita-cita yang sama.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi perbaikan. Aamiin.

Sukabumi, Februari 2025

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik UNIVERSITAS NUSA PUTRA, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gunawan alfarizi

NIM 20200090084

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenis karya : Skripsi

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, menyetujuai untuk memberikan kepada Universita Nusa Putra **Hak Bebas Royalti Non Ekslusif (Non-Ekslusif royalty-Free Right)** atas karya ilmiah yang berjudul:

“Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Kesehatan Pasien HIV/AIDS Studi Kasus Kabupaten Sukabumi”. Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan pemilik Hak Cipta.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Sukabumi

Tanggal : 17 February 2025

Yang menyatakan

(Gunawan Alfarizi)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN PENULIS.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian	7
F. SISTEMATIKA PENULISAN DAN OUTLINE	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan umum tentang HIV/AIDS	13
B. Kerangka teori	19
BAB III DATA PENELITIAN	29
A. Jumlah Pengidap HIV/AIDS Kabupaten Sukabumi Tahun 2021- 2023.	29
B. Jumlah ODHIV yang Mendapatkan Pengobatan ARV Dikabupaten Sukabumi Tahun 2021-2023.	31
C. Sektor Anggaran	32
D. Sarana Prasarana Dan Perawatan.....	33
E. Program Pemerintah Untuk Penanggulangan HIV/AIDS.....	34
BAB IV PEMBAHASAN	38
A. Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Kesehatan Pasien HIV/AIDS .	38
B. Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Kesehatan Pengidap HIV/Aids	40
C. Analisi Hambatan Dan Implementasi	46

BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

HIV atau *Human Immunodeficiency Virus* adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Penurunan kekebalan ini akan menyebabkan munculnya beberapa gejala penyakit yang berkembang menjadi AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*). kondisi di mana *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Di negara Indonesia, penyebaran dan penularan HIV paling banyak disebabkan melalui hubungan intim yang tidak aman dan bergantian menggunakan jarum suntik yang tidak steril saat memakai narkoba. Seseorang yang terinfeksi HIV dapat menularkannya kepada orang lain, bahkan sejak beberapa minggu sejak tertular. Semua orang berisiko terinfeksi (*Human Immunodeficiency Virus*) HIV¹.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang diolah Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 16.410 kasus *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) baru di Indonesia sepanjang 2023. Pada 2023 kasus AIDS baru paling banyak ditemukan di Jawa Barat, yakni 2.575 kasus atau 16% dari total kasus baru Nasional.Kasus baru terbanyak berikutnya ditemukan di Jawa Timur (2.432 kasus), dan Jawa Tengah (2.432 kasus) Adapun dari 38 provinsi di Indonesia, semuanya mencatatkan kasus AIDS baru pada tahun lalu Penambahan kasus paling sedikit tercatat di Papua Selatan (16 kasus), Sulawesi Barat (20 kasus), dan Papua Pegunungan (28 kasus).²

Berdasarkan jumlah orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang semakin meningkat tersebut maka kebutuhan orang dengan HIV/AIDS (ODHA) terhadap layanan kesehatan yang ada, baik dalam memperoleh pengobatan

¹ Aliffia Eka Syavitri and others, ‘*Hak Pasien HIV/AIDS Dalam Memperoleh Pelayanan Kesehatan Di RS Bhayangkara Surabaya*’, Journal of Police and Law Enforcement, Volume 3.5 (2023), hlm. 4.

² Kemenkes, ‘*Laporan Eksekutif Perkembangan HIV/AIDS Dan Penyakit Infeksi Menular Seksual Triwulan I.2023*. file:///C:/Users/ACER/Downloads/LaporanTW_I_2023%20(2).pdf.

maupun perawatan akan semakin meningkat juga. Penyandang HIV/AIDS memerlukan pelayanan tersendiri dikarenakan kondisi ini memiliki karakteristik yang khusus dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan individu. Pelayan kesehatan tersebut meliputi pelayanan fisik, pelayanan kesehatan, dan pelayanan psikologis dikarenakan orang dengan HIV/AIDS (ODHA) memerlukan pengobatan antiretroviral yang kompleks pelayanan ini diperlukan untuk memastikan akses yang tepat terhadap obat ARV, pemantauan kondisi kesehatan, serta manajemen efek samping dan komplikasi yang mungkin terjadi. Pengidap HIV/AIDS (ODHA) sering menghadapi berbagai masalah dalam mendapatkan hak kesehatan mereka, meskipun ada upaya untuk menyediakan akses yang lebih baik. Masalah-masalah ini meliputi akses terbatas dan kekurangan dalam layanan kesehatan dan pengobatan yang tersedia. Organisasi PBB untuk HIV/AIDS (UNAIDS) pada tahun 2019 menyebutkan, jumlah orang dewasa berusia lebih dari 15 tahun dengan HIV/AIDS di Indonesia yang mendapatkan pengobatan hanya 17 persen. Jika jumlah seluruh orang dengan HIV/AIDS sebanyak 640.000, artinya masih ada lebih dari 500.000 orang yang belum mendapatkan pengobatan. Penyebab utama minimnya cakupan pengobatan bagi orang dengan HIV/AIDS (ODHA) di Indonesia karena kurangnya *political will* dari pemerintah. Layanan untuk memberlakukan *test and treat* juga belum menyeluruh.³

Berdasarkan data September 2022 Kementerian Kesehatan (Kemenkes), capaian target tersebut hanya 79 persen orang dengan HIV (ODHIV) yang diketahui statusnya, 41 persen ODHIV diobati ARV, dan 16 persen ODHIV dengan jumlah virus tersupresi atau tidak lagi terdeteksi. Upaya agar mereka yang terdeteksi HIV untuk menjalani pengobatan atau terapi ARV belum maksimal dan masih di bawah 50 persen, selanjutnya Pada tahun 2023 laporan tahunan HIV/AIDS 2023 Kementerian Kesehatan menyebut, dari 515.455 ODHIV pada September 2023, hanya 88 persen yang mengetahui statusnya, dan

³ Deonisia Arlinta, *500.000 orang dengan Hiv/aids belum mendapatkan Pengobatan*, Kompas.com, Diakses 10 November 2024.

hanya 40 persen yang mendapat ARV, dengan hanya 33 persen mengalami penurunan jumlah virus.⁴

Di Sukabumi sendiri peningkatan meningkat kasus HIV/AIDS cukup signifikan. Sebanyak 1.968 warga kabupaten Sukabumi mengidap HIV AIDS, jumlah tersebut merupakan akumulasi dari 2000 sampai pertengahan tahun 2022. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sukabumi, mencatat selama Januari sampai Maret 2023 terdapat sebanyak 37 kasus Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immunodeficiency Syndrome (HIV/AIDS). Dalam kurun waktu Januari hingga Agustus 2024, tercatat 128 orang dinyatakan positif HIV dari 9.298 orang yang menjalani tes skrining. Kasus tertinggi terjadi pada kelompok berisiko seperti laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki (LSL), pengguna narkoba menyuntikkan, dan pasangan dengan perilaku seksual berisiko. Ditahun 2030 mendatang, Kabupaten Sukabumi memiliki target tri zero, diantaranya Tidak ada kematian baru akibat HIV/AIDS, tidak ada infeksi kasus baru, tidak ada diskriminasi terhadap penderita HIV/AIDS. Hal ini target nasional yang harus betul-betul disukseskan. Upaya yang harus dilakukan untuk menurunkan kasus HIV AIDS di Kabupaten Sukabumi. Dalam penanganan HIV/AIDS tanggung jawab negara memiliki peran sangat penting dalam aspek kebijakan kesehatan publik dan hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban mendasar untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan warganya, yang termasuk dalam penyediaan layanan kesehatan yang adil dan merata.⁵ Menurut Andi Hamza dikemukakan bahwa tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang atau negara untuk melaksanakan dengan selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya”. Tanggung jawab negara atau pertanggung jawaban negara terdapat di dalamnya dua istilah yang harus mendapat perhatian, yaitu *responsibility* dan *liability*. Kedua istilah ini sering digunakan secara rancu atau diperlakukan untuk menunjuk pada maksud yang sama. Menurut Goldie perbedaan kedua istilah tersebut adalah menyatakan bahwa istilah *responsibility* digunakan untuk

⁴ Kemenkes, ‘Laporan eksekutif perkembangan HIV/AIDS dan penyakit infeksi menular seksual triwulan 1. 2023. file:///C:/Users/ACER/Downloads/LaporanTW_1_2023%20(2).pdf.

⁵ Muhammad arifin, ‘Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Mimbar hukum, Volume 5.8 (2020,) Hal 10.

kewajiban (*duty*) atau menunjukkan pada standar pemenuhan suatu peran sosial yang ditetapkan oleh sistem hukum tertentu, sedangkan liability digunakan untuk menunjuk pada konsekuensi dari suatu kesalahan atau kegagalan untuk melaksanakan suatu kewajiban atau untuk memenuhi suatu standar tertentu yang telah ditetapkan. Tanggung jawab negara mencakup kewajiban negara untuk melaksanakan administrasi publik secara adil, transparan, dan serta mematuhi prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Tanggung jawab ini melibatkan penerapan prinsip keadilan administratif untuk memastikan bahwa keputusan dan tindakan administratif tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta prinsip efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya publik untuk mencapai hasil yang diinginkan. Negara juga harus menjamin kepastian hukum dengan memberikan prosedur yang jelas dan konsisten, serta melindungi hak-hak individu melalui mekanisme pengawasan, evaluasi, dan akses ke perlindungan hukum.⁶

Dalam hal pelayanan kesehatan di Indonesia, konsep tanggung jawab negara seperti keadilan administratif, efisiensi, transparansi, dan sangat relevan dan penting untuk memastikan bahwa layanan kesehatan, termasuk untuk penderita HIV/AIDS, dilaksanakan secara optimal. Keadilan, sebagai salah satu prinsip utama, menuntut agar pemerintah menyediakan layanan kesehatan dan memastikan bahwa semua individu, terlepas dari status kesehatan atau latar belakang sosial-ekonomi mereka, memiliki akses yang setara terhadap perawatan medis. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 pasal 28H ayat (3) mengamanatkan bahwa “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. ketentuan pasal 28H ayat (3) tersebut, terkait dengan Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Konstitusi telah mengamanatkan bahwa penyediakan fasilitas kesehatan merupakan tanggung jawab negara, dan negara juga

⁶ A Koswara, ‘Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pemberian Dan Pengajuan Pengajuan Kompensasi Dan Restitusi Terhadap Korban Pelanggaran Ham Berat , Jurnal kajian hukum Volume 3.8 (2021)Hal 6.

bertanggung jawab untuk menjamin masyarakat dapat menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan selanjutnya disebut UU kesehatan dalam Pasal 28H ayat (1) Menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kesehatan dan pelayanan kesehatan yang layak”. Ini termasuk pasien penderita HIV/AIDS, yang memiliki hak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai, aman, dan berkualitas. Selanjutnya Pasal 6 Menegaskan: “bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau”. Untuk pasien HIV/AIDS, ini berarti mereka harus memiliki akses ke terapi *antiretroviral* (ARV), perawatan medis, serta layanan kesehatan lainnya yang diperlukan untuk pengelolaan penyakit mereka.⁷

Jaminan kesehatan terhadap pasien dengan HIV/AIDS juga terdapat di dalam Permenkes Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV/AIDS pasal 30 ayat (1) berbunyi: “Setiap fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menolak pengobatan dan perawatan ODHA”. Rencana kebutuhan dibuat secara bertahap, dicatat dan dikomunikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Soal pendanaan, perawatan dan pengobatan bagi ODHA yang miskin, negara tidak mampu membiayainya. Pemerintah dan pemerintah daerah diharuskan mengalokasikan dana untuk membiayai pencegahan HIV dan AIDS. Pasal 47 Permenkes No. 21 Tahun 2013 menyatakan “setiap penyelenggara asuransi kesehatan wajib menanggung sebagian atau seluruh biaya pengobatan dan perawatan tertanggung yang terinfeksi HIV. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Upaya Penanggulangan HIV dan AIDS memberikan landasan hukum untuk perlindungan dan mencakup hak kesehatan pasien HIV/AIDS salah satunya dalam pasal 24 ayat 2 yang menyebutkan “Setiap penyelenggara dan/atau penyedia layanan kesehatan wajib memberikan pelayanan pengobatan dan/atau perawatan kepada ODHA tanpa diskriminasi sesuai dengan fasilitas yang ada”.

⁷ Fheriyal Sri Isriawaty, *Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* tahun Volume 5.3, 2015. Hal 8.

Di Indonesia, ini berarti bahwa kebijakan kesehatan, termasuk akses ke pengobatan dan layanan untuk HIV/AIDS, harus disusun dan diimplementasikan dengan cara yang memastikan bahwa penderita HIV/AIDS mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak ada kelompok yang terpinggirkan atau dirugikan secara tidak adil dalam sistem kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang adil dan tidak memihak, yang merupakan tujuan utama Pemerintah Undang-Undang Dasar 1945 untuk mewujudkan kesejahteraan yang adil dan makmur dengan melaksanakan pembangunan berkelanjutan, termasuk pembangunan bidang kesehatan. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, motivasi dan kemampuan semua orang untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Akses ke layanan medis tidak boleh mendiskriminasi orang pada tingkat sosial ekonomi. Mereka yang tidak mampu atau miskin perlu memiliki kesempatan yang sama dengan mereka yang memiliki akses ke layanan medis yang berkualitas.⁸

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, oleh karena itu kesehatan merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Setiap negara mengakui bahwa kesehatan adalah aset terbesar untuk kemakmuran. Dengan demikian, peningkatan pelayanan kesehatan pada hakikatnya merupakan investasi sumber daya manusia untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai sarana pengawasan sosial dan hukum, diharapkan dapat melindungi hak-hak pasien *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* atau *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* dengan nilai-nilai seperti non-diskriminasi, toleransi dan empati. Namun, saat ini masih ada kesenjangan antara apa yang seharusnya dan apa yang seharusnya terjadi ketika melindungi hak-hak orang yang hidup dengan HIV/AIDS. Lemahnya perlindungan ODHA berdampak pada semakin banyak ODHA.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul (**Implementasi tanggung jawab negara terhadap hak kesehatan bagi pasien terpapar HIV/AIDS studi kasus sukabumi**)

⁸ Ronny Josua Limbong, Nadia Farikhati and others. *Kajian pemenuhan hak katas kesehatan bagi kelompok rentan 2024*. Hal 7.

B. Identifikasi Masalah

1. Apa saja hambatan-hambatan implementasi hak kesehatan pasien HIV/AIDS di Sukabumi?
2. Bagaimana implementasi Undang-Undang kesehatan dalam memenuhi hak kelompok penyintas HIV/AIDS?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis tanggung jawab negara terhadap hak kesehatan bagi kelompok penyintas HIV/AIDS.
2. Menganalisis implementasi undang-undang kesehatan dalam memenuhi hak kelompok penyintas HIV/AIDS.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara Praktis:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat berguna sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu dibidang Hukum Adminstrasi Negara dan Hukum kesehatan.

b. Kegunaan Praktis

a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis khususnya mengenai regulasi dan tanggung jawab pemerintah terhadap hak kesehatan penyintas HIV/AIDS

b. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi mahasiswa program studi Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra.

c. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh skripsi program studi Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra.

E. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris, yang akan dilakukan penulis yaitu menggali informasi dilapangan (*Field Research*).

Penelitian normatif-empiris digunakan untuk menganalisis atau mengetahui sudah sejauh mana peraturan atau undang-undang dan hukum yang berjalan secara efektif.

Fungsi dari metode penelitian normatif-empiris yaitu untuk memantau hukum secara langsung agar dapat melihat perkembangan hukum yang berjalan di masyarakat. Penelitian hukum normatif-empiris seringkali digunakan untuk mengkonsepkan apa yang sudah tertulis pada aturan undang-undang (law in book) dan juga hukum di konsepkan untuk digunakan dalam kaidah atau norma agar manusia dapat berprilaku yang pantas.

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pengkajian yuridis normatif mengenai Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Kesehatan Bagi Pasien Terpapar Hiv/Aids dan implementasinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Permenkes Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV/AIDS.



2. Metode Pendekatan

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan dengan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menalaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang ada di Indonesia kaitannya dengan tugas negara Indonesia yang melindungi warga negaranya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dalam hal ini berkaitan dengan permasalahan yang di angkat penulis. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis menalaah tanggung jawab negara terhadap hak kesehatan bagi pengidap HIV/AIDS berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Permenkes Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV/AIDS.

3. Tahap Penelitian

Adapun tahapan penulis dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Tahap persiapan, yaitu sebelum dilaksanakannya penelitian lebih lanjut dimana penulis mencari dan mempelajari fenomena ataupun

permasalahan yang akan menjadi objek dalam penelitian ini serta menentukan metode penelitian yang akan digunakan.

- b. Tahap penelitian, yaitu setelah tahap persiapan dilakukan, dimana penulis akan melakukan aktivitas penelitian dengan dilandaskan pada metode dan pendekatan yang sudah ditentukan.

4. Teknik Pengumpul Data

Sumber data yang digunakan oleh Peneliti dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun bahan-bahan hukum yang ada yang dapat dijadikan sumber dalam penlitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

- a. Bahan hukum primer

Data primer merupakan informasi yang dihimpun atau dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari lapangan atau melalui interaksi dengan individu yang terlibat dalam studi. Sumber informasi primer ini berupa individu atau perorangan yang menjadi narasumber, seperti dalam proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Wawancara. Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan pewawancara dalam mengajukan pertanyaan langsung kepada responden, dan respon atau jawaban yang diberikan oleh responden kemudian dicatat atau direkam. Lincon dan Guna yang dikutip dalam Basrowi dan Suwandi menjelaskan bahwa tujuan dari wawancara adalah untuk merinci informasi tentang individu, peristiwa, aktivitas, organisasi, emosi, motivasi, tuntutan, serta keprihatinan. Selain itu, wawancara juga berfungsi untuk mengembangkan ekspektasi masa depan, memverifikasi data, mengubah dan meluaskan pengetahuan melalui pandangan orang lain.
- 2) Observasi. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap objek yang sedang diteliti. Observasi melibatkan proses pemilihan, perubahan,

pencatatan, dan pengkodean berbagai tindakan dan situasi yang terkait dengan organisasi atau fenomena yang sedang diteliti, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris yang telah ditetapkan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum dan karya ilmiah hukum lainnya.

5. Analisis Data

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada morma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma hidup dan berkembang dalam Masyarakat. Analisis secara kualitatif juga menafsirkan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini secara garis besar dilakukan secara offline dan online. Penelitian secara offline akan dilakukan di perpusatakan, baik perpustakaan Universitas Nusa Putra, perpustakaan daerah, serta tempat pendukung lainnya. Penelitian secara offline juga dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi dan Komisi penanggulangan AIDS Sukabumi.

Adapun Penelitian secara online dilakukan dengan pencarian secara online untuk jurnal, *e-book* dan karya tulis ilmiah lain.

7. Jadwal Penelitian

Nama Kegiatan	Bulan ke				
	I	II	III	IV	V
Tahap Persiapan					
Usulan topik penelitian dan identifikasi masalah					
Penyusunan usulan penelitian					
Seminar usulan Penelitian					
Tahap Penelitian					
Pengumpulan data					
Analisis data					
Penulisan skripsi					

F. SISTEMATIKA PENULISAN DAN OUTLINE

Penelitian ini akan disusun dengan sistematika penulisan yang terbagi atas 5 (lima) bab. Adapun tata letak dan urutan masing-masing bab serta pokok bahasannya adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis mengemukakan mengenai latar belakang permasalahan yang membahas tanggung jawab negara terhadap hak kesehatan bagi pasien terpapar HIV/AIDS. Pada bab ini juga berisi identifikasi atau rumusan masalah yang akan penulis kemukakan dalam penelitian ini dan akan menjadi gambaran pembahasan daripada penelitian ini. Dilanjutkan dengan kerangka pemikiran yang akan menjelaskan landasan teori yang akan dikolerasikan dengan permasalahan yang diteliti dan menjadi acuan penulis menganalisis penelitian dalam penelitian ini. Selanjutnya dalam bab ini juga berisi tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian yang menjelaskan spesifikasi

penelitian, metode pendekatan-pendekatan, tahap penelitian, Teknik pengumpulan data, analisis data, lokasi penelitian dan jadwal penelitian. Bab ini diakhiri dengan sistematika penulisan yang berisikan gambaran isi dari tiap-tiap bab yang akan disusun dalam penelitian.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menyuguhkan tinjauan mengenai tanggung jawab negara terhadap hak kesehatan pasien terpapar HIV/AIDS. Dalam bab ini penulis mengkaji objek penelitian diantaranya tanggung jawab negara terhadap hak kesehatan bagi pengidap HIV/AIDS dan implementasinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Permenkes Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV/AIDS.

3. BAB III HASIL PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan dan membahas bagaimana tanggung jawab negara Bagaimana tanggung jawab Negara terhadap hak kesehatan bagi kelompok penyintas HIV/AIDS dan Bagaimana implementasi Undang-Undang kesehatan dalam memenuhi hak kelompok penyintas HIV/AIDS.

4. BAB IV ANALISIS PEMBAHASAN PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan hasil dari analisis yang dilakukan oleh penulis mengenai tanggung jawab Negara terhadap hak kesehatan bagi kelompok penyintas HIV/AIDS.

5. BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menguraikan bagian penutup dalam penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan menjelaskan secara singkat hasil penelitian yang diperoleh penulis dan penginterpretasikannya sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran penulis berupa rekomendasi yang diambil dari hasil pembahasan dan analisis rumusan masalah serta kesimpulan dalam penelitian mengenai tanggung jawab negara terhadap hak kesehatan pasien HIV/AIDS.

BAB V

PENUTUP

Kiranya dari hasil pembahasan pada bab-bab terdahulu dapat kita kemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Sukabumi masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan ketersediaan anggaran, kelangkaan obat, dan akses layanan kesehatan yang belum merata. Meskipun terdapat berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait, namun masih diperlukan peningkatan dalam berbagai aspek. Minimnya anggaran yang dialokasikan untuk program penanggulangan HIV/AIDS menjadi kendala utama dalam penyediaan layanan kesehatan yang optimal bagi penderita HIV/AIDS hal ini bertentangan dengan Dalam Pasal 7 Bab II Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2012, yang mengatur tentang Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS yang secara jelas mengamanatkan pemerintah daerah untuk memfasilitasi, menetapkan status epidemi, dan menyediakan fasilitas pendukung dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS.
2. Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah melakukan beberapa upaya dalam penanggulangan HIV/AIDS. Hal ini terlihat dari berbagai upaya yang telah dilakukan, seperti penyusunan Peraturan Daerah, alokasi anggaran, penyediaan layanan kesehatan, dan program-program pencegahan. Namun, berbagai tantangan masih dihadapi, terutama terkait ketersediaan anggaran, akses layanan kesehatan yang merata.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Penulis menyarankan agar pemangku kebijakan di Kabupaten Sukabumi segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mempercepat pencapaian target eliminasi HIV/AIDS pada tahun 2030. Beberapa langkah yang perlu dilakukan adalah meningkatkan ketersediaan obat-obatan antiretroviral, memperbaiki sarana

dan prasarana kesehatan, serta mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk program sosialisasi dan edukasi masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan akses layanan kesehatan bagi penderita HIV/AIDS, menurunkan angka penularan, dan pada akhirnya mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang bebas dari HIV/AIDS.

2. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyarankan untuk masyarakat agar meningkatkan kesadaran dan pengetahuan akan bahaya HIV, karena ketidaktahuan mengenai cara penularan dan dampak HIV tidak hanya berisiko menginfeksi individu, namun juga dapat mengancam kesehatan keluarga. Oleh karena itu, edukasi yang mengenai HIV perlu dilakukan untuk melindungi diri sendiri dan orang-orang disekitar.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta 2011.

Hetty Panggabean,” *Buku Ajar Etika Dan Hukum Kesehatan*,” Widina Bhakti Persada Bandung 2020.

Takdir, *PENGANTAR HUKUM KESEHATAN*. Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo.2018.

Rantung, Margareth Inof Riisyie, ‘*Evaluasi Kebijakan Publik (Konsep Dan Model)*’, Tahta Media Group, 2024.

Rani Tiyas Budiyanti,” *Buku Ajar Kebijakan Kesehatan: Implementasi Kebijakan Kesehatan*,” Undip Press Universitas Diponegoro, Semarang 2020

Ronny Josua Limbong, “*Kajian Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Kelompok Rentan di Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*,” (Komnas HAM RI) Jalan Latuhaarhary No.4B, Menteng, Jakarta Pusat.

Yenny Sucipto “*Menelusuri Kebijakan Anggaran HIV & AIDS*. Jakarta, 17 Agustus 2019.

Sari Priyanti & Agustin Dwi Syalfina, “*Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Dan Keluarga Berencana*, CV Kekata Group, Surakarta 2017.

Ronny Josua Limbong, “*Kajian Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Kelompok Rentan di Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*,” (Komnas HAM RI) Jalan Latuhaarhary No.4B, Menteng, Jakarta Pusat.

B. Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945
2. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 *Tentang Kesehatan*
3. dalam Permenkes Nomor 21 Tahun 2013 tentang *Penanggulangan HIV/AIDS*
4. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2015 tentang *Penyelenggaraan Upaya Penanggulangan HIV dan AIDS*
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*
6. Undang-Undang Kesehatan yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang *Kesehatan*
7. UU No. 23 Tahun 2014 tentang *pembagian urusan pemerintahan pusat dan daerah*
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang *Fasilitas Pelayanan Kesehatan*

C. Skripsi

Riri Asillryll," *Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusla Di Bidang Agama*, "Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.,

Tampubolon, Natanael." *Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Kesehatan Dalam Perspektif HAM*, Skripsi Universitas HKBP Nomensen.

Intan Putri Rahayu," *Analisis Yuridis – Empiris Implementasi Hukum Dalam Pelayanan Terhadap Pasien Di Pukesmas Poncol*, "Skripsi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo 2022

Salma diva aurora, Hak, Pemenuhan, Atas Pelayanan, Kesehatan Bagi, D I Kota, Bandar Lampung, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, and Bandar Lampung. *Salma Diva Aurora*, 2024.

D. jurnal

Amanah, Fitria Saefatu, Beddy Iriawan Maksudi, and Euis Salbiah. "ANALISIS KINERJA PEGAWAI DALAM PENANGGULANGAN HIV / AIDS ANALYSIS OF CIVIL SERVANT PERFORMANCE IN PREVENTING HIV / AIDS" 6 (2020).

Anas, Vina Helmaliya, Moch Aspihan, and Iskim Luthfa. "Hubungan Pengetahuan Dan Dukungan Keluarga Dengan Kualitas Hidup Orang Dengan Hiv/Aids (Odha) Di Balikesmas Wilayah Semarang." *Jurnal Ilmiah Sultan Agung* 3, no. 1 (2024).

Andi Cudai Nur, Muhammad Guntur. *Analisis Kebijakan Publik. Analisis*

- Kebijakan Publik*, 2017.
- Ardana, Eva, and Yulia Sholichatun. “Resiliensi Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA).” *Psikoislamika : Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam* 11, no. 1 (2014).
- Basuki, Udiyo. “Merunut Konstitutionalisme Hak Atas Pelayanan Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 1, no. 1 (2020)
- Desrinelti, Desrinelti, Maghfirah Afifah, and Nurhizrah Gistituati. “Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan.” *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 6, no. 1 (2021): 83. <https://doi.org/10.29210/3003906000>.
- Dewi Agustina, Lutfiyah Nada Salsabila, Eka Madani Nasution, and Deliana S. “Strategi Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit.” *Detector: Jurnal Inovasi Riset Ilmu Kesehatan* 1, no. 3 (2023)
- Dewi, Ni Luh Yulyana. “Dinamika Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik.” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 3, no. 2 (2019)
- Eka Syavitri, Aliffia, Sri Priyati, Universitas Bhayangkara Surabaya, and Corresponding Author. “Hak Pasien HIV/AIDS Dalam Memperoleh Pelayanan Kesehatan Di RS Bhayangkara Surabaya.” *Journal of Police and Law Enforcement* 1, no. 1 (2023).
- Elsad, Ari Rahmat, and Gunawan Widjaja. “Hak Penderita Hiv Dalam Perspektif Ham.” *Cross-Border* 5, no. 1 (2022)
- Evicenna Naftuchah Riani, Dewi Ambarwati, and Dzikria Afifah Primala Wijaya. “Implementasi Layanan PDP Di Layanan Kesehatan Primer Kabupaten Banyumas.” *NERSMID : Jurnal Keperawatan Dan Kebidanan* 5, no. 1 (2022):
- Fahlevi, Heru, and Muhammad Ananta. “Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP).” *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)* 2, no. 1 (2017).
- Hak, Pemenuhan, Atas Pelayanan, Kesehatan Bagi, D I Kota, Bandar Lampung, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, and Bandar Lampung. *Salma Diva Aurora*, 2024.
- Husni, Lily Putri. “Responsibility to Protect Sebagai Doktrin Atau Norma Yang Berkembang Dalam Hukum Internasional.” *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 1 (2022).

- Jegalus, Desiderata, Rina Waty Sirait, Dominirsep O Dodo, and Yoseph Kendjam. “Timorese Journal of Public Health Volume 1 Nomor 2 , Juni Tahun 2019
- Karyadi, Teguh H. “Keberhasilan Pengobatan Terapi Antiretroviral.” *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* 4, no. 1 (2017).
- Koswara, A. “Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pemberian Dan Pengajuan Pengajuan Kompensasi Dan Restitusi Terhadap Korban Pelanggaran Ham Berat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Dan Pp Nomor 44 Tahun 2008.” *Jurnal Hukum Doctrinal* Volume 6, (2021)
- Lestari, Yanti, and Itsna Nurhayat. “Sosialisasi Pengetahuan Dasar Komprehensif Hiv / Aids.” *Komunikasi* IX, no. 02 (2015)
- Libra, Robert, and Muhammad Fauzan. “Penerapan Konsep Welfare State Dalam Memprioritaskan Pelayanan Dibidang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Riau.” *Jurnal Esensi Hukum* 5, no. 1 (2023)
- Manusia, H A K Asasi. “Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia 2020.
- Marlinda, Roza, Putri Dafriani, and Veolina Irman. “Jurnal Kesehatan Medika Saintika Jurnal Kesehatan Medika Saintika.” *Jurnal Kesehatan Medika Saintika* 11, no. 2 (2020)
- Marwiyah, Siti. “Hak Untuk Hidup Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Hukum Bisnis Dan Administrasi Negara* 1, no. 1 (2015).
- Matondang, Ikhwan. “Keragaman Pemikiran Tentang Hak Asasi Manusia.” *Miqot* XXXII, no. 2 (2008):
- Nurdin, Muhammad Ali, Yendra Erison, and Kata Kunci. “Journal Of Social And Political Science PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA SEMPU KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG TAHUN 2020
- Oliver, J. “Manajemen Pelayanan Penanggulangan HIV/AIDS Pada Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Manado.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013)
- Pamungkas, Tareq Jati, and Achmad Hariri. “Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Persepektif Welfare State” 3, no. 3 (2022):

- Pangaribuan, Luhut M.P. "Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 19, no. 6 (2017).
- Pesurnay, Althien John. "Kontrak Sosial Menurut Immanuel Kant: Kontekstualisasinya Dengan Penegakan HAM Di Indonesia." *Jurnal Filsafat* 31, no. 2 (2021): 192. <https://doi.org/10.22146/jf.56142>.
- Rahayu. "Eksistensi Prinsip 'Responsibility To Protect'." *MMH, Jilid 41 No. 1 Januari 2012* Jilid 41, no. Januari (2012):
- Rantung, Margareth Inof Riisyie. "Evaluasi Kebijakan Publik (Konsep Dan Model)." *Tahta Media Group*, 2024,
- Rochmawati, Jusuf S. Effendi, Herman Susanto, Hadi Susiarno, Tony Widjadjakusumah, and Anita Deborah Anwar. "Pengaruh Program Pencegahan Penularan Hiv (Human Immunodeficiency Virus) Dari Ibu Ke Anak Terhadap Kejadian Hiv Pada." *Ug Jurnal* 14 (2020)
- Rohim Yunus, Nur. "Aktualisasi Welfare State." *FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR* 3, no. 2 (2015)
- Ronny Josua Limbong, Nadia Farikhati, Mochamad Felani Budi Hartanto, Isneningtyas Yuli, Ajie, Zsabrina Marchsya Ayunda, Delsy Nike, Arief Ramadhan, Melia Iska Novitasari, Lanang Saputri, Fardhani, Febriana Ika. *Kajian Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Kelompok Rentan Di Indonesia. ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.* Vol. 53, 2019.
- Rusyidi, Binahayati. "PENGETAHUAN REMAJA TERHADAP HI V-AI D," 2018
- Susmayanti, Riana, Jenjang Norma, Hans Kelsen, and Jenjang Norma. "PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA" 13 (n.d.): 363–87.
- Widyawati, Nur, and Murtaqib. "Identifikasi Status Psikologis Sebagai Upaya Pengembangan Model Rehabilitasi Klien HIV/AIDS Berbasis Komunitas." *Nurseline Journal* 1, no. 1 (2016):
- WIFAQAH, SANDY. "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Alat Kesehatan." *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 2020,
- Fitria Saefatu Amanah, "Analisis kinerja pegawai dalam penanggulangan HIV /

- AIDS . "Jurnal GOVERNANSI." Volume 6 Nomor 2, Oktober 2023."
- Riri Asillryll," *Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Bidang Agama*, "Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta,.
- Eva Achjani Zulfa," *Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia*, " Lex Jurnalica Vol. 3 /No. 1 / April 2015,
- Tareq Jati Pamungkas." *Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Persepektif Welfare State*, " Media of law and Sharia, Volume 3, Issue 3, 2022.
- Lefri Mikhae," *Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Jiwa Dihubungkan Dengan Hak Asasi Manusia*, " Jurnal Ham, Volume 13, No 1 April 2022.
- Tampubolon, Natanael." *Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Kesehatan Dalam Perspektif HAM*, Skripsi Universitas HKBP Nomensen.
- Moch. Rizal Abdullah," *Akses Kesehatan Pada Perempuan Yang Dilacurkan Yang Mengidap Hiv/Aids*, " Jurnal Untag," Januari 2020, Vol. 5, No. 2.
- Widodo J Pudjirahardjo," *Kebijakan, Sebuah Kebutuhan Dalam Desentralisasi Kesehatan*, " Bulletin Penelitian Sistem Kesehatan - Vol 9 No. 4 Oktober 2021
- dr. Rani Tiyas Budiyanti, M.H," *Buku Ajar Kebijakan Kesehatan: Implementasi Kebijakan Kesehatan*, " Undip Press Universitas Diponegoro, Semarang 202
- Sylfia Rizzana *Implementasi Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS*, " JIAP Vol. 3, No. 3, pp 160-165, 2017."
- Norsyifa Hasanah Putri," *Efektivitas Program Warga Peduli Aids DiSurakarta*, Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan, Volume 2, No 2 2020.
- Elsad and Widjaja, "Hak Penderita Hiv Dalam Perspektif Ham. Vol. 5 No. 1 Januari-Juni 2022.
- Susiana, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi," *Jurnal aspirasi*, "Volume 6, No 2 (2019).
- Irwansyah Reza Mohamad, *Perlindungan Hukum Atas Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia*, "Jurnal Akademika, " Vol 8, No 2 (2019).

Kemenkes. "Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pengendalian Hiv Aids Dan Pims Di Indonesia Tahun 2020-2024." https://hivaids-pimsindonesia.or.id/download/file/RAN_AIDS_2024.pdf"

Rohim Yunus, "Aktualisasi Welfare State, Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 3 No. 2 (2015), Hlm 6."

Yenny Sucipto "Menelusuri Kebijakan Anggaran HIV & AIDS. Jakarta, 17 Agustus 2019,

Eko Sutriyanto, Arv Sulit Diperoleh Odha Disukabumi, Dalam Tribunnews, Selasa 16 Juni 2020 .

Liza Salawati, *Pencegahan dan Pengendalian HIV/AIDS pada Pekerja Konstruksi Menuju Eliminasi HIV di Indonesia tahun 2030*, Jurnal Usk. Vol 21, No 3 (2021).

Ila Qhoirunnisa,"*Studi Literatur Evaluasi Penggunaan Antiretroviral Pada Penderita Hiv/Aids*, Jurnal Ilmiah Indonesia, "Vol.7 No 11 November 2022

Intan Putri Rahayu,"*Analisis Yuridis – Empiris Implementasi Hukum Dalam Pelayanan Terhadap Pasien Di Pukesmas Poncol*,"Skripsi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo 2022

Evicenna Naftuchah Riani, "Implementasi Layanan PDP Di Layanan Kesehatan Primer Kabupaten Banyumas."Jurnal keperawatan,"November 2022.

Rintan Illahi Wahyu,"*Analisis Pelaksanaan Layanan Perawatan Dukungan Dan Pengobatan (Pdp) Hiv–Aidsdi Rumah Sakitdaerah Sukabumi*," J-Remi," Vol. 1 No. 4 September 2020"

Rochmawati., "Pengaruh Program Pencegahan Penularan Hiv (Human Immunodeficiency Virus) Dari Ibu Ke Anak Terhadap Kejadian Hiv Pada Anak Di Rsud R. Syamsudin, Sh Kabupaten Sukabumi," Udg Jurnal Vol.14 Edisi 03 Maret 2020.

Lestari and Nurhayat, "Sosialisasi Pengetahuan Dasar Komprehensif Hiv / Aids. Jurnal Komunikasi, Vol. IX No. 02, September 2015.

Dewi, "Dinamika Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial," Vol 3, No. 2, Agustus 2019

Rega Nurul Iman, KPA Sukabumi Sosialisasikan Bahaya HIV Ke Siswa, Sukabumi,Dalam Republika, Februari 2022.

Oliver, "Manajemen Pelayanan Penanggulangan HIV/AIDS Pada Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Manado,Maret 2020.

Marlinda, Dafriani, and Irman, "Faktor - Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Minum Obat Pasien Hiv/Aids," Jurnal Kesehatan Medika Saintika," Volume 14 nomor 1 (Juni 2023) Hlm 14.

Rega Nurul Iman, KPA Sukabumi Sosialisasikan Bahaya HIV Ke Siswa, Sukabumi,Dalam Republika, Februari 2022."

Widyawati and Murtaqib, "Identifikasi Status Psikologis Sebagai Upaya Pengembangan Model Rehabilitasi Klien HIV/AIDS Berbasis Komunitas, NurseLine Journal Vol. 1 No. 1 Mei 2016.

